

Jurnal Hubungan Internasional Indonesia

Invasi Rusia ke Ukraina Tahun 2022: Analisis Perspektif Keamanan Sosial

Farhan Setyo Kuncoro¹, Rendy Wirawan²

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman

² Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman, rendy.wirawan@fisip.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 melalui perspektif keamanan sosial dengan menggunakan kerangka Copenhagen School. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana Rusia membangun narasi sekuritisasi terhadap identitas komunitas penutur bahasa Rusia di Donbas sebagai justifikasi invasi militer. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis wacana kritis terhadap pidato politik, kebijakan negara, dokumen resmi, serta pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rusia memanfaatkan konsep *Russky Mir* untuk mengonstruksi keterikatan historis, budaya, dan identitas antara Rusia dengan komunitas di Ukraina timur. Identitas kolektif ini dibingkai sebagai objek referen yang terancam oleh kebijakan nasionalisasi Ukraina, khususnya dalam isu bahasa, budaya, dan simbol sejarah. Narasi perlindungan ini berfungsi ganda: mengonsolidasikan legitimasi domestik sekaligus mencari pembenaran internasional. Namun, mayoritas komunitas internasional menilai klaim tersebut sebagai manipulasi wacana demi kepentingan geopolitik Rusia.

Kata kunci: Keamanan Sosial, Sekuritisasi, Russky Mir, Invasi Rusia, Ukraina, Donbas.

Abstract

This study analyzes the Russian invasion of Ukraine in 2022 through the lens of societal security using the Copenhagen School framework. The focus of the research is on how Russia constructed a securitization narrative regarding the identity of Russian-speaking communities in the Donbas as a justification for military intervention. The study employs a qualitative descriptive method with critical discourse analysis of political speeches, state policies, official documents, and media coverage. The findings reveal that Russia employed the concept of Russky Mir to construct historical, cultural, and identity-based linkages between Russia and the communities in eastern Ukraine. This collective identity was framed as a referent object under threat from Ukraine's nation-building policies, particularly in matters of language, culture, and historical symbols. The protection narrative served a dual function: consolidating domestic legitimacy while also seeking international justification. However, the majority of the international community regarded these claims as discursive manipulation pursued in the service of Russia's geopolitical interests.

Keyword: Societal Security, Securitization, Russky Mir, Russian Invasion, Ukraine, Donbas.

Pendahuluan

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi salah satu peristiwa geopolitik terbesar dalam dua dekade terakhir, dengan dampak signifikan terhadap keamanan regional dan global. Konflik ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi ketegangan historis yang berakar sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Saat itu, Ukraina memilih jalur kedaulatan melalui referendum, namun tetap menyisakan keterikatan erat dengan Rusia, baik secara budaya, bahasa, maupun sejarah (Mankoff, 2022). Ketegangan semakin meningkat setelah Ukraina berusaha memperkuat hubungan dengan Barat. Revolusi Orange 2004 dan peristiwa Euromaidan 2014 menjadi titik balik, ketika pemerintahan Ukraina yang pro-Rusia tumbang dan digantikan oleh rezim yang lebih pro-Barat. Hal ini dipandang Rusia sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya (Sakwa, 2015). Sebagai respons, Rusia menganeksasi Krimea pada 2014 dan mendukung kelompok separatis di Donbas. Konflik ini kemudian memuncak dengan kegagalan Perjanjian Minsk dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan (Charap & Colton, 2018).

Selain faktor geopolitik, dimensi identitas memainkan peran sentral. Pemerintah Ukraina pasca-2014 menerapkan kebijakan nasionalisasi, termasuk penguatan penggunaan bahasa Ukraina dalam ruang publik, penolakan simbol-simbol Soviet, dan penguatan identitas nasional non-Rusia (Kulyk, 2016). Kebijakan tersebut dipersepsikan oleh Rusia sebagai bentuk diskriminasi terhadap komunitas penutur bahasa Rusia, khususnya di Donetsk dan Luhansk. Dalam konteks inilah Rusia mengembangkan narasi bahwa invasi tahun 2022 bukanlah agresi, melainkan misi perlindungan terhadap komunitas yang termarginalisasi (Laruelle, 2015). Narasi ini dibangun melalui konsep *Russky Mir*, yang memandang penutur bahasa Rusia di luar negeri tetap sebagai bagian dari identitas kolektif Rusia. Dengan membungkai isu identitas sebagai ancaman eksistensial, Rusia berhasil melakukan sekuritisasi, yakni mengubah isu sosial menjadi isu keamanan yang dianggap sah untuk direspon melalui langkah luar biasa, termasuk intervensi militer (Tsygankov, 2023).

Oleh karena itu, memahami invasi Rusia ke Ukraina tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan tradisional yang berfokus pada aspek militer dan geopolitik. Diperlukan analisis keamanan non-tradisional, khususnya perspektif keamanan sosial dari *Copenhagen School*, untuk menjelaskan bagaimana isu identitas digunakan sebagai instrumen politik dalam membenarkan tindakan agresi negara (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) untuk menjelaskan konstruksi narasi keamanan sosial dalam invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Penelitian kualitatif deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual tanpa menguji

hipotesis, melainkan berfokus pada pemahaman terhadap gejala dan fakta sosial secara mendalam (Hardani et al., 2020).

Fokus penelitian diarahkan pada analisis narasi keamanan sosial dalam konteks invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 melalui perspektif keamanan non-tradisional sektor sosial. Agar ruang lingkup penelitian lebih terfokus, pembahasan dibatasi pada alasan Rusia kembali melakukan invasi terhadap Ukraina dengan menyoroti konstruksi wacana perlindungan terhadap komunitas berbahasa Rusia di wilayah Donbas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain seperti buku, jurnal ilmiah, artikel daring, dan dokumen resmi. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai latar belakang, dinamika, dan narasi yang membingkai konflik Rusia–Ukraina.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data sekunder yang berkaitan langsung dengan isu yang diteliti. Pendekatan analisis wacana kritis digunakan untuk menelaah bagaimana Rusia dan Ukraina membingkai konflik ini melalui narasi keamanan sosial, terutama dalam konteks pembentukan persepsi ancaman dan legitimasi tindakan politik.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis sebagaimana dikemukakan oleh Fairclough (2010), yang menekankan bagaimana bahasa dan narasi membentuk makna, identitas, serta legitimasi tindakan politik dalam suatu konteks sosial. Analisis ini membantu mengungkap relasi kekuasaan dan ideologi di balik teks seperti pidato politik, media massa, dan dokumen resmi. Penelitian ini juga mengacu pada kerangka teori *Copenhagen School* yang menjelaskan bahwa sekuritisasi merupakan proses konstruksi ancaman eksistensial melalui tindakan ujaran (*speech act*), di mana aktor politik berupaya meyakinkan audiens tentang adanya ancaman terhadap identitas sosial atau kelompok tertentu (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998; Balzacq, 2011).

Hasil dan Pembahasan

Invasi Rusia ke Ukraina Tahun 2022

Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 merupakan puncak dari ketegangan politik dan identitas yang telah berlangsung sejak krisis 2014. Rusia membingkai tindakan tersebut bukan sebagai agresi, melainkan sebagai intervensi perlindungan terhadap komunitas penutur bahasa Rusia di Donbas. Narasi ini disusun melalui wacana diskriminasi, marginalisasi, dan ancaman eksistensial yang dikaitkan dengan kebijakan nasionalisasi Ukraina, seperti UU

Bahasa 2019, program derusifikasi, serta pembatasan simbol-simbol Rusia di ruang publik (Kulyk, 2019; Pavlenko, 2020).

Kremlin menekankan bahwa penduduk Donbas menjadi korban diskriminasi linguistik, represi politik, dan bahkan genosida, sehingga Rusia memiliki kewajiban moral dan historis untuk bertindak. Klaim ini diperkuat dengan data konflik bersenjata di Donbas sejak 2014 yang menewaskan lebih dari 14.000 orang (United Nations, 2022). Dalam pidatonya, Presiden Putin menegaskan bahwa Ukraina telah menjadi “negara boneka Barat” yang menindas kelompok pro-Rusia, sehingga invasi diposisikan sebagai langkah penyelamatan (Putin, 2022).

Namun, konstruksi wacana ini lebih bersifat politis daripada faktual. Mayoritas lembaga internasional, seperti OSCE dan PBB, tidak menemukan bukti adanya genosida sistematis (OSCE, 2022; United Nations, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa narasi keamanan sosial digunakan Rusia untuk melegitimasi tindakan militer yang pada hakikatnya melanggar hukum internasional (Allison, 2023). Dengan demikian, invasi 2022 tidak hanya didorong oleh kepentingan geopolitik, tetapi juga oleh sekuritisasi identitas yang dikembangkan secara sistematis sejak aneksasi Krimea (Tsygankov, 2023).

Alasan Invasi Rusia Dalam Perspektif Keamanan Sosial

Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 dikonstruksikan oleh Kremlin bukan hanya sebagai perang konvensional, melainkan sebagai respons terhadap ancaman eksistensial terhadap komunitas tertentu, terutama penutur bahasa Rusia dan etnis Rusia di wilayah Donbas. Melalui berbagai pidato resmi, pernyataan politik, dan saluran media negara, Rusia membungkai bahwa kebijakan nasionalisasi identitas pasca-2014 di Ukraina telah menimbulkan penindasan sistematis yang mengancam keberlangsungan budaya, bahasa, dan simbol-simbol sosial komunitas tersebut (Makarychev & Yatsyk, 2022). Dengan demikian, isu yang semula bersifat politik dan administratif diangkat menjadi persoalan keamanan eksistensial. Dalam perspektif teori sekuritisasi, langkah Rusia ini mencerminkan bagaimana sebuah negara dapat mengubah narasi ancaman identitas sosial menjadi legitimasi atas tindakan ekstrem (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Sekuritisasi tidak hanya berhubungan dengan ancaman militer, melainkan juga meliputi perlindungan atas bahasa, sejarah, agama, dan nilai-nilai identitas kolektif yang dianggap fundamental. Dalam konstruksi narasi Rusia, hilangnya ruang budaya dan simbol identitas diproyeksikan sebagai bentuk “pemusnahan simbolik” yang pada akhirnya membenarkan tindakan luar biasa berupa intervensi militer lintas batas negara (Laruelle, 2015).

Rusia memperkuat klaimnya dengan menekankan adanya “kewajiban moral” untuk melindungi komunitas yang dianggap bagian dari *Russky Mir*, meskipun secara formal berada di luar kedaulatan Rusia. Hal ini membuat narasi sekuritisasi Rusia memiliki kekuatan emosional sekaligus politis, karena mengaitkan tindakan militer dengan misi penyelamatan identitas. Narasi tersebut kemudian diproduksi dan direproduksi secara konsisten melalui

strategi diskursif, antara lain media negara, lembaga kebudayaan, organisasi diaspora, dan saluran diplomatik. Dengan cara ini, Rusia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menjalankan perang wacana yang sama pentingnya dalam konflik modern. Pertarungan tidak hanya terjadi di medan tempur, melainkan juga di ranah makna dan legitimasi politik. *Keamanan sosial* menjadi instrumen dominan yang digunakan Kremlin untuk melampaui batas pendekatan realis tradisional, sekaligus merebut legitimasi atas tindakannya di mata publik domestik maupun sebagian audiens internasional (Tsygankov, 2023).

a. Ide Russky Mir (Dunia Rusia)

Konsep *Russky Mir* (Dunia Rusia) merupakan gagasan yang berakar pada pandangan bahwa semua penutur bahasa Rusia, etnis Rusia, dan penganut tradisi Ortodoks Timur, baik yang tinggal di dalam maupun di luar Federasi Rusia, adalah bagian dari satu kesatuan peradaban (Laruelle, 2015). Sejak awal, konsep ini digunakan sebagai instrumen *soft power* untuk memperkuat identitas budaya, memelihara ikatan diaspora Rusia, dan menyebarluaskan pengaruh Rusia melalui jalur pendidikan, kebudayaan, serta diplomasi publik (Suslov, 2018). Namun, sejak krisis Ukraina tahun 2014, *Russky Mir* mengalami pergeseran makna dari instrumen kebudayaan menjadi legitimasi politik. Kremlin menggunakan untuk membingkai bahwa komunitas Rusia di luar negeri bukan sekadar diaspora, melainkan bagian dari tubuh sosial Rusia yang wajib dilindungi (Zevelev, 2016). Dalam kerangka teori sekuritisasi, *Russky Mir* berfungsi sebagai objek referen, yakni identitas kolektif yang dianggap terancam dan karenanya sah untuk dilindungi dengan langkah luar biasa, termasuk intervensi militer (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

Perkembangan ini terlihat jelas dalam konflik Georgia 2008, aneksasi Krimea 2014, hingga invasi Ukraina 2022. Dalam setiap kasus, Rusia menggunakan narasi bahwa komunitas Rusia atau penutur bahasa Rusia mengalami diskriminasi, represi, atau penghapusan identitas, sehingga intervensi diposisikan sebagai “misi perlindungan” (Makarychev & Yatsyk, 2022). Dengan demikian, *Russky Mir* tidak hanya mengandung dimensi kultural, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka ideologis yang melegitimasi ekspansi politik Rusia. Dalam konteks invasi 2022, *Russky Mir* menjadi dasar untuk mengklaim bahwa Donbas adalah bagian integral dari dunia Rusia, meskipun secara administratif berada di bawah kedaulatan Ukraina (Tsygankov, 2023). Narasi ini memperkuat dukungan publik domestik dengan membangkitkan nasionalisme, sekaligus berfungsi sebagai justifikasi moral dan historis atas tindakan militer Rusia (Morozov, 2015). Akan tetapi, dari perspektif hukum internasional, klaim tersebut menabrak prinsip kedaulatan dan non-intervensi, serta dipandang mayoritas komunitas internasional sebagai bentuk manipulasi wacana demi kepentingan geopolitik (Allison, 2023). Dengan demikian, ide *Russky Mir* dapat dipahami sebagai instrumen ganda: di satu sisi memperkuat identitas dan persatuan internal Rusia, dan di sisi lain digunakan untuk memperluas legitimasi politik eksternal. Narasi ini menunjukkan bagaimana isu identitas dapat dimobilisasi menjadi alat justifikasi agresi negara dalam konflik internasional (Makarychev, 2021).

b. Russkiy Mir Sebagai Pola Intervensi Rusia

Konsep *Russkiy Mir* (Dunia Rusia) berakar pada pandangan bahwa seluruh penutur bahasa Rusia, komunitas etnis Rusia, dan pengikut tradisi Ortodoks Timur merupakan bagian dari peradaban Rusia, meskipun tinggal di luar batas teritorial negara (Laruelle, 2015). Pada awalnya, gagasan ini dipromosikan melalui jalur kebudayaan dan diplomasi publik sebagai sarana mempererat ikatan dengan diaspora Rusia (Suslov, 2018). Namun, dalam perkembangannya, *Russkiy Mir* bermesra menjadi instrumen politik yang digunakan Kremlin untuk membenarkan intervensi di kawasan pasca-Soviet. Sebagai pola intervensi, *Russkiy Mir* berfungsi melalui mekanisme sekuritisasi identitas. Rusia mengonstruksi narasi bahwa komunitas Rusia di luar negeri menghadapi diskriminasi, marginalisasi, bahkan ancaman eksistensial dari pemerintah negara tempat mereka berada (Makarychev & Yatsyk, 2022). Dengan menjadikan identitas sebagai objek referen, Rusia memperoleh legitimasi untuk melakukan tindakan luar biasa, termasuk intervensi militer (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Narasi ini diperkuat melalui pidato politik, propaganda media, serta kebijakan luar negeri yang menekankan peran Rusia sebagai pelindung komunitas Rusia di manapun berada.

Contoh penerapan pola ini dapat ditelusuri pada beberapa peristiwa. Pada konflik Georgia 2008, Rusia melakukan intervensi di Ossetia Selatan dan Abkhazia dengan alasan melindungi warga Rusia (Allison, 2008). Selanjutnya, pada aneksasi Krimea 2014, Kremlin menggunakan *Russkiy Mir* untuk membungkai bahwa Krimea memiliki keterikatan historis dengan Rusia dan penduduknya membutuhkan perlindungan dari kebijakan Ukraina pasca-Euromaidan (Zevelev, 2016). Puncaknya, dalam invasi Ukraina 2022, konsep ini kembali dijadikan dasar klaim bahwa masyarakat Donetsk dan Luhansk terancam diskriminasi bahasa, marginalisasi budaya, serta represi politik, sehingga intervensi militer diposisikan sebagai kewajiban moral dan historis (Makarychev, 2021; Tsygankov, 2023). Dengan demikian, *Russkiy Mir* bukan hanya gagasan identitas, melainkan juga pola intervensi yang konsisten digunakan Rusia untuk memperluas pengaruh politik dan geopolitiknya. Pola ini berfungsi ganda: memperkuat legitimasi domestik dengan membangkitkan nasionalisme internal, serta mencoba menciptakan pemberanahan internasional atas tindakan militer. Namun, mayoritas komunitas internasional menolak narasi ini dan menilai bahwa *Russkiy Mir* lebih merefleksikan manipulasi wacana demi kepentingan ekspansionis Rusia ketimbang perlindungan nyata terhadap minoritas (United Nations, 2022; OSCE, 2022).

c. Perlindungan Terhadap Komunitas Rusia di Ukraina Timur

Wilayah timur Ukraina, khususnya Donbas, sejak 2014 menjadi episentrum konflik yang sarat muatan identitas dan politik. Kawasan ini dihuni oleh komunitas besar etnis Rusia dan penutur bahasa Rusia sekitar 38% etnis Rusia dan lebih dari 70% menggunakan bahasa Rusia sehari-hari berdasarkan sensus 2001 sehingga ikatan historis dan budaya dengan Rusia sangat kuat (State Statistics Committee of Ukraine, 2003). Pasca Revolusi Euromaidan, pemerintah Ukraina mendorong integrasi nasional melalui kebijakan bahasa, termasuk pencabutan UU Bahasa Regional 2012 dan pengesahan UU 2019 yang mewajibkan penggunaan bahasa Ukraina di sektor publik, pendidikan, dan media (Kulyk, 2019). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat identitas nasional Ukraina, tetapi bagi Rusia

dan komunitas Rusia di Ukraina, langkah tersebut dianggap sebagai bentuk penghapusan eksistensi simbolik maupun struktural (Makarychev & Yatsyk, 2015).

Rusia kemudian mengeksploitasi kondisi ini dengan membangun narasi bahwa komunitas Rusia di Donbas hidup dalam situasi represif. Melalui media resmi dan pernyataan publik, Ukraina digambarkan sebagai negara yang tidak melindungi minoritasnya, bahkan menindas mereka. Klaim diskriminasi, pelanggaran HAM, dan kekerasan sipil diproyeksikan sebagai dasar moral intervensi. Hal ini mencapai puncaknya dalam pidato Putin 21 Februari 2022, yang menyebut rakyat Donbas mengalami “genosida selama delapan tahun,” sehingga Rusia “tidak punya pilihan” selain bertindak. Dari perspektif teori sekuritisasi, langkah Rusia merupakan *securitizing move* klasik: menghadirkan ancaman eksistensial di hadapan audiens untuk melegitimasi tindakan luar biasa seperti invasi lintas batas. Narasi ini tidak hanya ditujukan ke masyarakat domestik, tetapi juga kepada dunia internasional serta komunitas Rusia di Ukraina. Namun, klaim “genosida” mendapat banyak kritik. Organisasi internasional seperti OSCE dan sejumlah pakar menilai tuduhan tersebut tidak memiliki bukti yang cukup dan lebih merupakan retorika hiperbolik serta manipulatif. Hal ini memperlihatkan bahwa sekuritisasi bukanlah refleksi realitas objektif, melainkan konstruksi diskursif yang dapat dibentuk, diperkuat, dan dimanfaatkan negara untuk kepentingan politiknya.

d. Perlindungan Terhadap Komunitas yang Termarginalisasi

Selain penutur bahasa Rusia dan etnis Rusia di Donbas, Rusia juga membangun narasi bahwa terdapat kelompok-kelompok lain yang mengalami marginalisasi akibat kebijakan nasionalisasi Ukraina setelah Euromaidan. Marginalisasi ini, menurut Kremlin, berlangsung dalam beberapa bentuk. Pertama, di bidang bahasa, UU Bahasa 2019 mewajibkan penggunaan bahasa Ukraina di ruang publik, yang dipandang sebagai upaya menghapus identitas linguistik penutur bahasa Rusia. Kedua, di ranah politik, pembubaran partai pro-Rusia, penahanan tokoh oposisi, serta pemblokiran media dianggap sebagai bukti pembungkaman terhadap oposisi sah. Ketiga, di sektor keagamaan, pengakuan Gereja Ortodoks Ukraina (Patriarkat Kyiv) memicu ketegangan dengan Patriarkat Moskow, yang oleh Rusia dibingkai sebagai bentuk persekusi terhadap umat Ortodoks Rusia. Keempat, di tingkat simbolik dan historis, kebijakan dekomunisasi dan derusifikasi dianggap menghapus jejak sejarah bersama dengan Rusia.

Dalam kerangka ide *Russky Mir*, kelompok-kelompok ini dipandang sebagai bagian dari dunia Rusia yang perlu dilindungi, meskipun berada di luar kedaulatan negara Rusia. Kremlin menekankan adanya kewajiban moral dan historis untuk menjaga mereka dari ancaman yang dikonstruksikan sebagai eksistensial, sejalan dengan logika sekuritisasi yang memungkinkan tindakan luar biasa seperti intervensi militer. Namun, meskipun narasi ini berhasil mendapat dukungan domestik, banyak pihak internasional, termasuk OSCE, menilai klaim genosida maupun pembersihan etnis tidak memiliki bukti kuat (OSCE, 2022). Dengan demikian, wacana marginalisasi lebih berfungsi sebagai instrumen politik untuk membungkai invasi sebagai misi perlindungan, bukan agresi (Sakwa, 2023).

e. Penolakan Terhadap Narasi Ancaman Rusia Dalam Invasi Ukraina

Rusia berupaya membangun narasi sekuritisasi dengan menekankan perlindungan terhadap komunitas penutur bahasa Rusia dan kelompok yang diklaim terancam. Namun, narasi tersebut tidak diterima secara universal. Ukraina secara tegas menolak tuduhan diskriminasi maupun genosida, dengan menegaskan bahwa kebijakan bahasa, termasuk UU No. 2704-VIII/2019, ditujukan untuk memperkuat identitas nasional dan kohesi sosial, serta dipandang sebagai bagian dari proses dekolonialisasi simbolik dari warisan dominasi Rusia pada era Soviet (Kulyk, 2022). Dengan demikian, Ukraina memandang narasi Rusia sebagai manipulasi diskursif yang dimaksudkan untuk membenarkan agresi militer. Komunitas internasional pun memberikan tanggapan kritis. OSCE melalui misi pemantauannya menyatakan tidak ada bukti genosida terhadap penutur bahasa Rusia (OSCE, 2022). Human Rights Watch dan Amnesty International mengakui adanya pelanggaran HAM dari kedua belah pihak dalam konflik Donbas, tetapi tidak menemukan pola sistematis yang dapat dikategorikan sebagai pemusnahan etnis atau diskriminasi berbasis bahasa. Selain itu, Majelis Umum PBB melalui resolusi pada Maret 2022 menolak justifikasi Rusia, menyatakan bahwa invasi merupakan tindakan agresi yang melanggar hukum internasional. Dukungan mayoritas terhadap resolusi tersebut menunjukkan bahwa narasi “intervensi kemanusiaan” Rusia gagal mendapatkan legitimasi global.

Dalam kerangka teori sekuritisasi, perkembangan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan *securitizing move* sangat ditentukan oleh penerimaan audiens. Rusia mungkin berhasil mengonsolidasikan dukungan domestik, tetapi di tingkat internasional narasinya dipandang manipulatif, penuh framing, dan ditolak secara normatif maupun legal. Hal ini menegaskan bahwa sekuritisasi bukan proses yang absolut, melainkan arena kontestasi wacana yang melibatkan berbagai aktor dengan otoritas normatif masing-masing. Narasi ini memperlihatkan adanya “pertarungan diskursif” dalam konflik Rusia–Ukraina. Di satu sisi, Rusia berupaya memanfaatkan identitas sosial sebagai instrumen justifikasi moral atas invasi. Di sisi lain, Ukraina dan komunitas internasional menolak dengan menekankan prinsip kedaulatan, hukum internasional, dan perlindungan HAM. Dengan demikian, sekuritisasi Rusia tidak hanya diperdebatkan secara politis, tetapi juga dipertarungkan melalui norma, legitimasi internasional, serta kerangka hukum yang berlaku.

Keamanan Sosial Sebagai Justifikasi Alternatif Dalam Invasi Rusia ke Ukraina

Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 tidak semata-mata berakar pada kalkulasi geopolitik atau pertimbangan militer, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh narasi keamanan sosial yang dibangun secara sistematis oleh Kremlin (Tsygankov, 2022). Melalui proses sekuritisasi, Rusia membingkai bahwa identitas, bahasa, serta nilai-nilai budaya komunitas penutur bahasa Rusia di Ukraina, khususnya di Donbas, menghadapi ancaman eksistensial (Laruelle, 2015; Zevelev, 2016). Wacana ini diperkuat dengan gagasan *Russky Mir* sebagai identitas transnasional yang perlu dilindungi, tuduhan adanya penindasan sistemik akibat kebijakan nasionalisasi Ukraina, serta klaim marginalisasi ideologis dan religius pasca-Euromaidan. Narasi tersebut diproduksi melalui berbagai saluran, mulai dari media negara, pidato resmi, hingga diplomasi internasional.

Dalam kerangka teori sekuritisasi Copenhagen School, langkah Rusia dapat dikategorikan sebagai *speech act* yang memperoleh legitimasi domestik karena narasi ancaman diakui oleh publik Rusia dan komunitas diaspora (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Dengan adanya penerimaan audiens, tindakan luar biasa seperti penggunaan kekuatan militer dipandang sah secara moral, meskipun bertentangan dengan norma hukum internasional. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan sekuritisasi tidak bergantung pada kebenaran objektif suatu ancaman, melainkan pada bagaimana ancaman tersebut dikonstruksikan dan diterima oleh audiens yang relevan (Balzacq, 2011). Meski demikian, narasi keamanan sosial ini tidak dapat dilepaskan dari motif geopolitik yang lebih luas, seperti keinginan Rusia mencegah perluasan NATO dan menjaga pengaruhnya di kawasan pasca-Soviet. Narasi perlindungan berfungsi sebagai legitimasi tambahan, yang membuat klaim Rusia lebih dapat diterima oleh publik domestik dibanding sekadar alasan perebutan kekuasaan. Dengan membingkai invasi sebagai “misi kemanusiaan” untuk melindungi identitas dan budaya, Kremlin berupaya mengubah tindakan agresi menjadi sesuatu yang bernilai moral dan ideologis.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana isu-isu non-militer, seperti bahasa, budaya, dan identitas, dapat dipolitisasi hingga setara dengan ancaman fisik. Rusia berhasil memproyeksikan masalah kultural dan linguistik sebagai isu keamanan nasional, sehingga membenarkan pelanggaran prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara (Morozov, 2015). Kasus ini juga menegaskan bahwa perang modern tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di medan wacana, di mana legitimasi dibangun melalui simbol, narasi, dan konstruksi identitas. Dengan demikian, analisis keamanan sosial sangat relevan dalam membaca konflik Rusia–Ukraina. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana narasi dapat digunakan sebagai senjata politik untuk memperoleh legitimasi atas tindakan kontroversial. Lebih jauh, hal ini mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap manipulasi wacana dalam politik global, karena isu-isu identitas dapat dijadikan instrumen untuk membenarkan pelanggaran norma internasional. Pada akhirnya, pertarungan dalam konflik kontemporer tidak hanya soal perebutan wilayah, tetapi juga perebutan makna dan legitimasi di mata dunia.

Kesimpulan

Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 tidak hanya merupakan perang konvensional, melainkan juga perang wacana yang melibatkan sekuritisasi identitas sosial sebagai alat justifikasi politik. Rusia membangun narasi perlindungan terhadap etnis Rusia di Luhansk dan Donetsk untuk membenarkan intervensinya, dengan menekankan ikatan historis, budaya, dan bahasa yang kuat dengan Moskow. Setelah Revolusi Euromaidan 2014, kebijakan nasionalisasi Ukraina dipersepsikan diskriminatif terhadap penutur bahasa Rusia, sehingga memunculkan rasa terancam dan mendorong lahirnya gerakan separatis yang kemudian mendapat dukungan Rusia.

Dalam kerangka teori sekuritisasi Copenhagen School, temuan ini menegaskan bagaimana identitas sosial dapat dipolitisasi dan dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial, sehingga melegitimasi tindakan luar biasa seperti invasi militer. Namun, perspektif keamanan sosial juga memiliki keterbatasan, sebab tidak sepenuhnya mampu menjelaskan faktor ekonomi dan geopolitik yang turut membentuk dinamika konflik. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sebaiknya menggabungkan teori sekuritisasi dengan pendekatan ekonomi-politik agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas konflik Rusia–Ukraina.

Daftar Pustaka

- Allison, R. (2008). *Russia resurgent? Moscow's campaign to "coerce Georgia to peace"*. *International Affairs*, 84(6), 1145–1171. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2008.00762.x>
- Balzacq, T. (2011). *Securitization theory: How security problems emerge and dissolve*. Routledge.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- Hardani, A., Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, & Sukmana, D. J. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu.
- Kulyk, V. (2016). National identity in Ukraine: Impact of Euromaidan and the war. *Europe-Asia Studies*, 68(4), 588–608. <https://doi.org/10.1080/09668136.2016.1174980>
- Kulyk, V. (2019). Language policy in Ukraine: What people want the state to do. *East European Politics and Societies*, 33(2), 280–301. <https://doi.org/10.1177/0888325418796871>
- Laruelle, M. (2015). *The “Russian World”: Russia’s soft power and geopolitical imagination*. Center on Global Interests.
- Makarychev, A. (2021). The geopolitics of memory and identity: Russia’s soft power and the politics of the past. *Problems of Post-Communism*, 68(5), 367–380. <https://doi.org/10.1080/10758216.2020.1803322>
- Makarychev, A., & Yatsyk, A. (2022). Russia’s war and the politics of identity: Narrating the “Russian World”. *Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society*, 8(1), 1–25.
- Morozov, V. (2015). *Russia’s postcolonial identity: A subaltern empire in a Eurocentric world*. Palgrave Macmillan.
- OSCE. (2022). *Report on the human rights situation in Ukraine, February–December 2022*. Organization for Security and Co-operation in Europe.
- Putin, V. (2022, February 24). *Address by the President of the Russian Federation*. Kremlin.ru. <http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843>

- Sakwa, R. (2015). *Frontline Ukraine: Crisis in the borderlands*. I.B. Tauris.
- Suslov, M. (2018). “*Russian World*” concept: The ideology of the Russian diaspora. In M. Laruelle (Ed.), *Russian nationalism: Imaginaries, doctrines, and political battlefields* (pp. 63–86). Routledge.
- Tsygankov, A. P. (2023). *Russian Realism: Defending the nation against the West*. Polity Press.
- United Nations. (2022). *Report on the human rights situation in Ukraine: 1 February – 31 December 2022*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).
- Zevelev, I. (2016). *The Russian World in Moscow’s strategy*. Center for Strategic and International Studies (CSIS).